

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nilai Perusahaan sangat penting dalam tingkat keberhasilan perusahaan, dimana nilai perusahaan dijadikan indikator bagi investor untuk pengelolaan keuangan perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya dipasar modal. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh perusahaan. Setiap perusahaan berusaha mencapai tujuannya dengan meningkatkan kemakmuran pemilik serta pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tersebut merupakan sejumlah harga saham yang bersedia dibayarkan oleh investor jika perusahaan tersebut akan dijual.

Hal itu akan tercermin dari harga pasar sahamnya, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham yang ditransaksikan di bursa efek atau pasar saham. Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka perusahaan akan memiliki citra yang semakin baik. Begitu pula dengan semakin tinggi nilai perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham.

Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang sering disebut dengan *agency problem*. Manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan

dengan tujuan perusahaan sehingga mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik. Konflik tersebut dapat terjadi karena manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan adanya kepentingan pribadi dari manajer hal tersebut dapat menambah biaya bagi perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham yang menurunkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dicapai dengan kinerja yang baik, maka diperlukan peran yang tepat untuk seluruh pemangku kepentingan di perusahaan, yang tercermin dalam tata kelola perusahaan.

Tindakan kontrol yang dilakukan oleh pihak luar sangat diperlukan yaitu dengan cara melakukan pengawasan aktivitas perusahaan. Pengawasan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pengendalian manajemen suatu perusahaan. Mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan instusional, komite audit, komisaris independen, dan auditor eksternal. Mekanisme tata kelola perusahaan ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Khalihatu (2009) mengenai *Good Corporate Governance* dengan penerapan yang terjadi di Indonesia. Masalah yang terjadi yaitu perkembangan manajemen yang tidak baik dan efisien membutuhkan sebuah alat baru yaitu dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut dikarenakan perusahaan-

perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya melakukan pembudayaan perusahaan (*corporate culture*) sebagai salah satu inti dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut dapat membuka wawasan bahwa perusahaan di Indonesia belum dikelola dengan benar, dengan kata lain perusahaan di Indonesia belum menjalankan tata kelola yang baik.

Setiap pemilik perusahaan, akan selalu menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan mereka merupakan tempat yang tepat untuk investor melakukan investasi. Sedangkan nilai perusahaan bagi perusahaan *go public*, dapat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin di *listing price*. Hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan yaitu semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk menghasilkan laba dan akan menciptakan nilai perusahaan yang semakin tinggi serta dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham. Perusahaan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan profitabilitas tinggi dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan baik, maka stakeholders akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pemerintah memiliki tuntutan yang lebih besar untuk menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai

pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak. Pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan. Pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan, untuk itu pajak harus dikelola dengan baik. Pendapatan sektor ekonomi akan mengalami peningkatan apabila setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya dengan serendah mungkin. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan menyebabkan perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan yang penting. Secara tradisional, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah pengalihan kekayaan berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, bukan berarti bahwa penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya-biaya langsung dapat berupa biaya implementasi, kerugian atas hilangnya reputasi perusahaan, hukuman yang kemungkinan dapat diterima, dll. Tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan dengan persoalan mengenai tata kelola perusahaan. Aktivitas perencanaan penghindaran pajak yang tidak transparan menyamarkan penyimpangan manajerial dan mengurangi nilai perusahaan. Sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau

tidak, tergantung dari implementasi tersebut dapat menguntungkan atau justru merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa *tax avoidance* mencerminkan adanya kepentingan pribadi dari pihak manajer dengan cara memanipulasi laba sehingga mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Sehingga perusahaan akan diberikan penilaian yang rendah oleh para investor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini meneliti mengenai bagaimana “**Pengaruh dari *good corporate governance*, profitabilitas dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan (Studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian selama empat tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penyusunan skripsi ini dapat dilakukan secara terarah dan tidak menyimpang dari tujuan semula, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini hanya pengaruh dari *good corporate governance*, profitabilitas dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah bentuk persepsi investor yang dilakukan berkaitan dengan harga saham dalam meningkatkan keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan merupakan bentuk memaksimalkan tujuan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham adalah memaksimumkan present value keuntungan pemegang saham yang diharapkan dalam investasi.

Menurut Sartono : **“Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi”**.¹

2.1.1 Faktor-Faktor Nilai Perusahaan

Dari penjelasan di atas maka terdapat juga faktor-faktor dalam perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba merupakan faktor yang membawa pengaruh yang positif terhadap nilai pertumbuhan perusahaan. Semakin tinggi nilai pertumbuhan laba yang dihasilkan maka semakin besar potensi keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian perusahaan dapat mengelola bisnisnya secara efisien karena mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi serta dapat

¹ Agus Sartono, **Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi**, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 2010, hal: 487

meningkatkan kepercayaan pada masyarakat dan mendapatkan investor yang mendorong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Faktor *Dividend Payout Ratio*

Faktor *Dividend Payout Ratio* merupakan nilai yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan yang semakin tinggi dari nilai jual yang meningkat pada perusahaan dengan memiliki keuntungan bagi pemegang saham.

Faktor *Dividend Payout Ratio* juga dapat memberikan sinyal kepada para investor terhadap perusahaan untuk mempertahankan dan merespon positif dengan pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga memiliki karakter pertumbuhan dividen.

3. Faktor *Required Rate of Return*

Faktor *Required Rate of Return* merupakan faktor nilai yang memiliki tingkat keuntungan yang dianggap layak di dapatkan bagi investor atau tingkat dengan keuntungan yang lebih diutamakan lagi.

Faktor *Required Rate of Return* dapat memberikan nilai hasil dengan menjual saham dan dapat mendorong penurunan harga saham lebih jauh juga.

2.1.2 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan terdapat beberapa jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungannya, antara lain:

1. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai Pasar

Nilai pasar adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di dalam pasar saham. Nilai pasar hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan.

4. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan konsep dasar akuntansi.

5. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi.²

2.1.3 Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio harga saham yang disebut dengan rasio penilaian.

Menurut Sudana : **“Rasio penilaian adalah rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal”**.³

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan:

1. *Price Earning Ratio*(PER)

Menurut Fahmi: **“*Price Earning Ratio* (PER) adalah perbandingan antara *market price pershare* (harga pasar perlembar saham) dengan *earning pershare* (laba perlembar saham)”**.⁴

Rumus yang digunakan untuk mengukur *Price Earning Ratio* (PER) adalah sebagai berikut:

² Christiawan, Yulius Jogi dan Josua Tarigan., **Kepemilikan Manajeral: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan.**: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No.1, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2007, hal: 1-8

³ I Made, Sudana., **Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hal: 23

⁴Fahmi Irham, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Kedua: Alfabeta, Bandung, 2012, hal: 78

$$\text{PER} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earning per Share}}$$

2. *Price to Book Value (PBV)*

Menurut Irham Fahmi: “***Price to Book Value (PBV)*** merupakan suatu keadaan dimana dapat dihitung harga nilai buku suatu perusahaan dengan membandingkan harga saham dengan nilai bukunya”.⁵

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Price to Book Value (PBV)* adalah sebagai berikut:

$$\text{PBV} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

3. *Tobin's Q*

Tobin's Q merupakan metode pengukuran nilai perusahaan yang perhitungannya dapat dibandingkan dengan nilai pasar dalam bentuk rasio saham terhadap perusahaan.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Tobin's Q* adalah sebagai berikut:

$$Q = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Dengan Keterangan:

Q = Nilai perusahaan

EMV = Nilai pasar ekuitas

⁵ Irham Fahmi, **Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi**, Alfabeta, Bandung, 2014, hal: 138

EBV = Nilai buku dari total aktiva

2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Hery:

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.⁶

Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dengan definisi sebagai berikut, “*A set a rules that define the relationship between shareholder manager, creditor, government, employee and other internal and external stakeholder in respect to the right and responsibility*”.

International Good Practice Guidance (IFAC 2009) Corporate governance didefinisikan sebagai serangkaian praktik dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan (komisaris) dan eksekutif manajemen dengan tujuan memberi arahan-arahan yang strategis , memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai, memastikan bahwa semua resiko dapat dikelola dengan benar ,memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggungjawab.

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefenisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang

⁶ Hery, **Potret Profesi Audit Internal**, Alfabeta, Bandung, 2010, hal: 11

mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Apabila mekanisme *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, maka OECD telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan.

1. *Fairness* (Kewajaran)

Fairness (Kewajaran) adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang.

Contoh dari *Fairness* adalah perlakuan yang setara pada publik, otoritas pasar modal, dan pemangku kepentingan.

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

2. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Disclosure dan Transparency (Transparansi) adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (Akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan

komisaris dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibility (Responsibilitas) adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.

Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak.

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

5. *Independency*(Independensi)

Independency (Independensi) adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Muh. Arief Effendi, prinsip *Good Corporate Governance*:

1. **Prinsip Transparansi (*Transparency*).**
2. **Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).**
3. **Prinsip Responsibilitas.**
4. **Prinsip Independensi.**
5. **Prinsip Kesetaraan.⁷**

2.2.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value dan deviden*.

Menurut Amin Widjaja Tunggal, manfaat *Good Corporate Governance*:

1. **Meminimalkan *agency cost***

⁷ Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Edisi 2: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal: 11

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. **Meningkatkan kinerja pemerintahan**
Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
3. **Memperbaiki citra pemerintahan**
Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.⁸

2.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Indra Suryana, tujuan *Good Corporate Governance*:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

2.2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Tujuan manajemen adalah mengembalikan keputusan yang menghasilkan harga saham maksimal. Sehingga permasalahan keagenan

⁸ Amin Widjaja Tunggal, *The Internal Auditing Handbook*, Harvindo, Jakarta, 2013, hal: 39

⁹ Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Edisi 2: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal: 7

dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan, artinya kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan manajer.

Menurut Bernandhi: **“Kepemilikan manajerial (*manjerial ownership*) adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan.”**¹⁰

Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh manajerial dan dewan komisaris perusahaan. Rumus untuk menghitung kepemilikan manajerial adalah:

$$\text{KPMJ} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Oleh Manajemen}}{\text{Modal Saham Perusahaan}}$$

¹⁰ Bernandhi Riza, **Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal: 14

2.2.5 Dewan Komisaris Independen

Mekanisme *corporate governance* yang tidak kalah penting adalah proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*.

Diperlukan komitmen yang penuh dari dewan komisaris agar implementasi *good corporate governance* dapat berjalan sesuai harapan. Fungsi utama dewan komisaris menurut Indonesian *code for corporate governance* adalah memberikan supervisi kepada dewan direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran ketika diminta oleh dewan direksi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris wajib bersikap independen.

Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Menurut Widjaja:

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya.¹¹

Rumus untuk menghitung kepemilikan dewan komisaris independen adalah:

¹¹ Widjaja, **150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas**, Forum Sahabat, Jakarta 2009, hal:79

$$\text{KDKI} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}}$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Selain kepemilikan manajemen yang dapat mengawasi secara efektif aktivitas perusahaan, keberadaan kepemilikan institusional juga dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan para investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan.

Menurut Tarjo : **"Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain".**¹²

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan

¹² Tarjo, **Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta *Cost of Equity Capital***, Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 2008, hal: 11

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Kepemilikan institusional (INST) yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki istitusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut .Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh institusional}}{\text{seluruh modal saham perusahaan}}$$

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return, yang terdiri dari yield dan capital gain. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau dengan modal (ekuitas).

Dalam hal ini dapat dijelaskan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan adalah sangat penting bagi investor maupun kreditor.

Menurut Sartono: **“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”**.¹³

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan penjualan atau aktiva atau modal sendiri.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya adalah *return on asset*. *Return on Assets* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rumus untuk menghitung nilai ROA adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.3.1 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio profitabilitas secara umum, antara lain:

¹³ Agus dan Sartono, **Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi**, BPFE, Yogyakarta, 2010, hal: 122

1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

2. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan.

3. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

4. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (income) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan

oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net worth), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

5. Rasio Pengembalian Penjualan (*Return on Sales Ratio*)

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional (operating margin) atau Margin pendapatan operasional (operating income margin).

6. Pengembalian Modal yang Digunakan (*Return on Capital Employed*)

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah rkuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan.

7. *Return on Investment* (ROI)

Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

8. *Earning Per Share (EPS)*

Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan.

Menurut Bambang Irham Fahmi, jenis profitabilitas:

1. *Net Profit Margin (NPM).*
2. *Gross Profit Margin (GPM).*
3. *Return On Investment (ROI).*
4. *Return On Equity (ROE).*¹⁴

2.3.2 Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir, tujuan rasio profitabilitas bagi pihak internal perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan:

1. Untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk menilai kinerja setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya.
6. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri.
7. Untuk mengevaluasi perkembangan atau kemunduran kinerja perusahaan sehingga bisa dilakukan upaya agar masalah yang terjadi tidak berlarut-larut.
8. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui seluruh kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan unsur-unsur laporan keuangan.

¹⁴ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal: 135

9. Untuk menggambarkan tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional.¹⁵

2.3.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat yang didapatkan oleh pihak luar perusahaan secara umum, terutama pihak-pihak yang berhubungan atau memiliki kepentingan dengan perusahaan antara lain:

1. Memperoleh gambaran tentang tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode (satu tahun).
2. Posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bisa dibandingkan dan dievaluasi. Memahami perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
3. Mendapat gambaran tentang laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri bisa dilihat dan dijadikan patokan yang sesuai [konsep dasar akuntansi](#) untuk merencanakan kegiatan pada periode berikutnya.

Menurut Kasmir, manfaat profitabilitas:

- 1. Mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang.**
- 2. Mengetahui pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.**
- 3. Meneginformasikan jumlah laba bersih perusahaan setelah di potong pajak.**

¹⁵ Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Ketujuh: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal: 197

4. Mengetahui produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan baik dari modal pinjaman maupun modal sendiri.¹⁶

2.4 Pajak

Pajak merupakan kewajiban atau beban yang dipungut Negara terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat wajib . Pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H, menyatakan bahwa *“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”*

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

¹⁶ Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi 1-8: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal: 198

¹⁷ Undang-Undang nomor 16 tahun 2009

2.4.1 Tarif Pajak

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti SE: “**Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar**”.¹⁸

Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak , yaitu :

1. Tarif Marginal

Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum.

2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. Persentasi tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko, struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak:

1. Tarif Pajak Proporsional

Merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapa pun nilainya. Apabila tarif ini ditetapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*).

2. Tarif Pajak Progresif (Persentase Meningkat)

Merupakan tarif dengan persentase meningkatn seiring dengan peningkatan jumlah yang dikenai pajak.

3. Tarif Pajak Tetap

Merupakan suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (*tax base*), objek maupun subjek pajak/wajib pajak .

4. Tarif Pajak Degresi (Persentase Menurun)

Merupakan tarif dengan persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jenis tarif pajak ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal,

¹⁸ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**, Edisi Pertama: Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, hal: 7

dimana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁹

2.4.2 Penghindaran Pajak

Semakin besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak maupun badan besar kemungkinan terjadi perlawanan untuk tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Perlawanan terhadap pajak dibagi atas dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara .

Menurut Sumarsan (2015:8) : **“Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak”**.²⁰

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki . Pengaruh penghindaran pajak bernilai positif hanya untuk perusahaan yang telah berdiri selama bertahun-tahun dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh institusi. Mereka membuktikan bahwa terdapat dua dampak yang saling bertentangan atas bagaimana penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara penghindaran pajak adalah pengalihan sumber daya pemerintah pada pemegang saham, gesekan permasalahan agensi antara manajemen dan pemegang

¹⁹ Y Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Penerbit Andi, 2009, hal: 82

²⁰Sumarsan Thomas, **Perpajakan Indonesia**, PT Indeks, Jakarta, 2015, hal: 8

saham meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan manajerial yang dapat memberikan pengaruh buruk pada nilai perusahaan.

Menurut Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), karakter penghindaran pajak:

1. **Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak .**
2. **Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan , padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang .**
3. **Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization ,1991*).²¹**

Penghindaran pajak berkenaan dengan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya . Oleh karena itu , penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan tariff pajak efektif (*effective tax rate*) . Tarif pajak efektif adalah tariff pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan.

Menurut Dyreng et. Al. dalam Oktofian (2015) : **“Variabel tarif pajak dihitung melalui *CASH ETR (Cash Effective Tax Rate)* perusahaan yaitu kas**

²¹ Suandy Erly, **Perencanaan Pajak**, Edisi 4: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal: 7

yang dikeluarkan untuk biaya pajak yang dibagi dengan laba sebelum pajak”.²²

CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas pajak. Adapun rumus untuk menghitung *tax CASH ETR* adalah sebagai berikut :

$$CASH ETR = \frac{Beban Pajak}{Laba Sebelum Pajak}$$

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal , yaitu 1 melakukan penghindaran pajak da 0 tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) kurang dari 25% dan apabila *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak .

²² Dyreng, S. et al.. **The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance**, Social Science Research Network, 2010

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Titin Herawati (2011) Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independem : Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas . Variabel Dependen : Nilai Perusahaan .	- kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan - Kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan -Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan

2.	Hana Nadia (2013) Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen : Tax Avoidance Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	Penghindaran Pajak secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
3.	Rina Susanti (2014) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responcibility terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Indepen : Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responcibility Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	- Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. - Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
4.	Silvia Ratih	Variabel Independen : Tata	- Kinerja

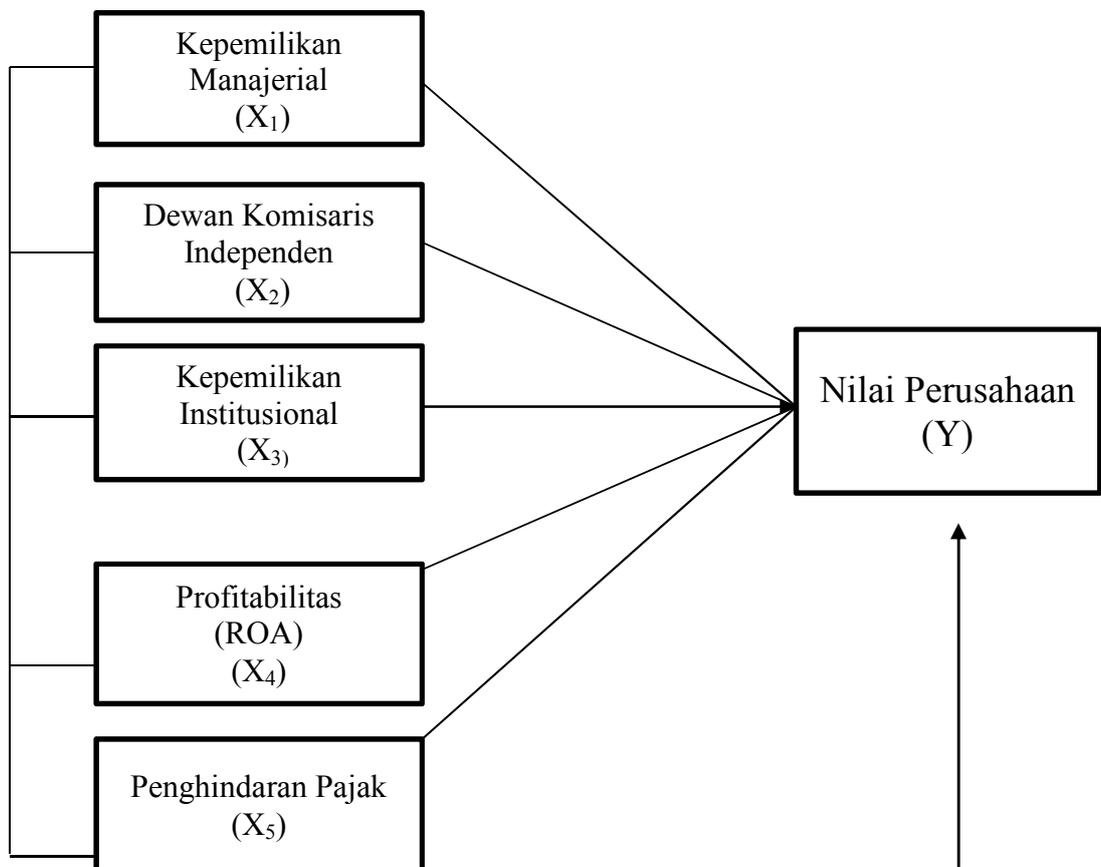
	(2014) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan	Kelola Perusahaan Variabel Dependen : Nilai Perusahaan .	perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - komite audit, proporsi direktur independen, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Nyi Nyoman dan I Made (2014) Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen: Corporate Governance Variabel Dependen : Nilai Perusahaan	variabel komite audit independen yang berpengaruh negatif pada nilai perusahaan sedangkan keempat variabel

			independen lainnya berpengaruh positif pada nilai perusahaan
6.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage , Price Earning Ratio dan Profitabilitas Variabel Dependen : Nilai Perusahaan .	- ukuran perusahaan, price earning ratio, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan secara parsial - leverage menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono: "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".²³

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal: 283

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba . Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan *return* .

Menurut Ayu Sri dan Ary Wirajaya : **“Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik”**.²⁴

Berdasarkan penelitian Ayu Sri dan Ari Wirajaya menyimpulkan bahwa : **“Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan”**.²⁵

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Keberadaan institusional justru menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Akibatnya pasar saham mereaksi negatif yang berupa turunnya volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga menurunkan nilai pemegang saham.

Menurut Wahyudi dan Pawestri: **“Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang**

²⁴ Ary Wijaya & Ayu Sri Mahatma Dewi, **Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Udayana, Bali, 2013, hal: 358-372

²⁵ Ary Wijaya & Ayu Sri Mahatma Dewi, **Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Udayana, Bali, 2013, hal: 358-372

dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan”.²⁶

Keberadaan komisaris independen juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000. Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. *Outsider directors* membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian hal ini akan memberikan benefit yang tinggi bagi perusahaan. Independensi dari corporate board akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengupayakan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik dan menyebabkan investor percaya untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga pada umumnya harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat.

²⁶ Wahyudi, Untung dan Hartini., **Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Keputusan Keuntungan Sebagai Variabel Intervening**, Simposium Nasional Akuntansi IX, Jakarta, 2006, hal: 1-25

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan . Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan , karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat pula.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkecil laba dengan cara tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi realisasinya diakui d masa yang akan datang agar laba yang dilaporkan pada periode sekarang kecil. Selain itu, penghindaran pajak dapat juga dilakukan dengan mengakui biaya personal menjadi biaya operasional perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh. Karena semakin tinggi laba perusahaan yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula beban pajaknya. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan berusaha untuk menekan laba yang diperoleh agar pajak yang dibayarkan perusahaan juga dapat berkurang. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan juga berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Karena, investor yang akan menanamkan modalnya cenderung melihat laba bersih perusahaan yang menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Hanlon dan Slemrod (2009), menguji bagaimana reaksi pasar terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat meningkatkan ataupun menurunkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat meningkat apabila agresivitas pajak di[andang sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak. Akan

tetapi nilai perusahaan tersebut dapat menurun jika dipandang sebagai ketidakpatuhan karena tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko sehingga nilai perusahaan akan menurun.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan . Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan , belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data . Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric dengan data .

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
2. H_2 : Dewan komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
3. H_3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
4. H_4 : Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.

5. H₅ : Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia.
6. H₆ : Kepemilikan manajerial, Dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, profitabilitas dan Penghindaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia. .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono:

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁷

Metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian ataupun hasil penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan situs www.idx.co.id. Penelitian ini dimulai dari Maret 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan

²⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2013, hal: 13

mengumpulkan data teori pendukung melalui jurnal maupun buku pendukung untuk dapat menggambarkan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan perdagangan yang dimuat dalam situs resmi bursa efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011 : 80) : **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”**²⁸

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub sector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
2. Perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap tahun 2013-2016.
3. Sahamnya tetap diperdagangkan selama periode perusahaan 2013-2016.
4. Perusahaan yang memiliki data kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), penghindaran pajak dan nilai perusahaan yang lengkap pada periode 2013-2016.

²⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2011, hal: 80

Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu.

Penentuan kriteria dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Jika perusahaan memenuhi kriteria diatas maka akan diberi tanda check list (√) pada kolom kriteria 1 dan 2, pada tabel yang tidak memenuhi kriteria akan diberi tanda cross (×). Perusahaan dapat dijadikan sampel apabila memenuhi kedua kriteria tersebut.

Tabel 3.1

Daftar sampel perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Nama perusahaan	Kode	Kriteria				sampel
			1	2	3	4	
1	Astra International Tbk	ASII	√	√	√	√	1
2	Astra Otoparts Tbk	AUTO	√	√	√	√	2
3	Garuda Metalindo Tbk	BOLT	√	×	√	√	
4	Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk	BRAM	√	√	√	×	
5	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	√	√	√	×	

6	Gajah Tunggal Tbk	GJTL	√	×	√	√	
7	Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS	√	√	√	×	
8	Indospring Tbk	INDS	√	√	√	√	3
9	Multi Prima Sejahtera Tbk d.h Lippo Enterprise Tbk	LPIN	√	√	√	×	
10	Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA	√	√	√	√	4
11	Nipress Tbk	NIPS	√	×	√	√	
12	Prima alloy steel Universal Tbk	PRAS	√	×	√	√	
13	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	√	√	√	√	5

Sumber : www.idx.co.id

Adapun perusahaan manufaktur sub sector otomotif yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sample Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASII	Astra International Tbk
2	AUTO	Astra Otoparts Tbk
3	INDS	Indospring Tbk
4	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
5	SMSM	Selamat Sejahtera Tbk

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id.

3.6 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.